

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal

Susiani¹ ✉ Anita Rusianti²

STIE Yapis Merauke

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji serta mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan jumlah penduduk terhadap belanja modal di Kota Jayapura. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis linear berganda dengan sumber data yaitu data sekunder berupa realisasi Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk dan Belanja Modal yang di peroleh dari Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKAD) Kota Jayapura.

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis linear berganda di dapatkan hasil yaitu: (1) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Kota Jayapura. (2) Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Kota Jayapura. (3) Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Kota Jayapura.

Kata Kunci: *pertumbuhan ekonomi; pendapatan asli daerah; jumlah penduduk; belanja modal.*

Copyright (c) 2022 Susiani & Rusianti

✉ Corresponding author :

Email Address : susyany26@gmail.com , anitarusianti@gmail.com

PENDAHULUAN

Kemandirian keuangan menjadi sangat penting bagi daerah terutama terkait dengan kontribusi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Pemerintah provinsi menyusun APBD sebagai bentuk perencanaan daerah. Di dalam APBD memuat secara rinci program-program yang akan dilaksanakan sekaligus sumber pembiayaannya. Penyusunan anggaran ditata agar mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan daerah yang berorientasi pada optimaisasi pelayanan publik. Tingkat kemampuan keuangan daerah dapat ditinjau salah satunya dari besar kecilnya penerimaan daerah khususnya pendapatan asli daerah dan retribusi. Realita yang terjadi di Kota Jayapura. Sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan bentuk persetujuan pemerintah, evaluasi kinerja setiap satuan perangkat daerah. (Undang-Undang No 17, 2003) Pasal 19 ayat 1 dan 2 Keuangan Negara menegaskan hal tersebut, yaitu tata cara berdasarkan prestasi kerja. Dengan membangun sistem penganggaran yang dapat mengintegrasikan rencana kinerja dan anggaran tahunan, anda dapat melihat keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan.

Di era pasca reformasi, perhatian akan difokuskan pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan layanan daerah yang mereka berikan, dan pemerintah daerah juga perlu melakukan investasi modal yang sesuai. Sejak diundangkannya (Undang-

Undang No 22, 1999) tentang Pemerintah Daerah, telah diubah dengan (Undang-Undang No 32, 2004). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meningkatkan pendapatan dari pelayanan publik dan kesejahteraan umum berdasarkan tujuan pemerintah daerah yang luas, tepat dan bertanggung jawab yang disepakati dengan pemerintah daerah dan DPRD sesuai dengan peraturan daerah. APBD juga harus mencerminkan pemenuhan kebutuhan masyarakat, dengan fokus pada potensi dan keragaman lokal. Salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal adalah tingkat pendapatan asli daerah. Hal ini sejalan dengan PP No. 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan menghasilkan pendapatan daerah (Marseno & Mulyani, 2020). Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2013). Pemerintah Kota Jayapura terus berusaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan di daerah adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, termasuk di dalamnya pemerataan pendapatan antar daerah. Keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat.

Kota Jayapura termasuk salah satu Kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, ditandai dengan nilai PDRB yang terus meningkat setiap tahunnya sejak tahun 2011-2021. Peningkatan tersebut juga diikuti dengan penambahan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah setiap tahun. Salah satu indikator penting untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dari perkembangan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah tersebut dari tahun ke tahun. PDRB. Nilai PDRB menjelaskan sejauh mana kemampuan daerah dalam mengelola atau memanfaatkan sumber daya yang ada. Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun di suatu daerah dapat diukur berdasarkan PDRB konstan. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut. yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar (Arifin & Jambi, 2009).

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (Halim, 2004). Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Melalui pendapatan Asli daerah yang merupakan penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan setiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi baik di daerahnya masing-masing guna meningkatkan pendapatannya (Mardiasmo, 2021). Dengan diterapkannya sistem otonomi daerah, maka daerah diberi kewenangan dan tugas untuk merencanakan, menggali, dan mengupayakan potensi dan sumber keuangan sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Sudaryo et al., 2021). Dengan demikian pemerintah daerah dituntut untuk mampu memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah nya masing-masing.

Jumlah penduduk setiap kabupaten dan kota mempengaruhi peningkatan belanja daerah. Menurut para ahli perencanaan pembangunan, jumlah penduduk yang besar di suatu wilayah dapat dikategorikan sebagai aset fundamental bagi

pembangunan daerah yang memungkinkan kemajuan dan pembangunan. Namun, hal ini dapat menimbulkan masalah baru: masalah pendanaan dan ketegangan dalam proses pembangunan. Dalam menentukan anggaran investasi, Pemerintah Negara harus mencari pendanaan untuk sarana dan prasarana yang akan dibangun yang dapat membantu memperlancar misi Pemerintah Negara agar dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, dengan memperhatikan kebutuhan lokal (Asmuruf, 2015). Selain itu, belanja modal yang wajar memungkinkan pemerintah untuk memaksimalkan pembangunan fasilitas umum yang diperlukan.

Kota Jayapura merupakan salah satu Kota yang di Provinsi Papua yang sedang mengalami proses pembangunan ekonomi. Pembangunan daerah adalah suatu proses pembangunan dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraann antara pemerintah daerah dengan sector swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2004). Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, didukung oleh sumber daya dan potensi daerah yang dimilikinya meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata. Pertumbuhan Ekonomi di Kota Jayapura yang ditandai dengan pertumbuhan nilai PDRB yang terus meningkat dapat dilihat pada Tabel .

Tabel 1. PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Jayapura Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017 - 2021

Tahun	Laju Pertumbuhan (%)
2017	4.95
2018	2.61
2019	-3.24
2020	1.24
2021	3.17

Sumber: luwuutaraKotabpd.go.id

Tabel 1 merupakan gambaran tentang Pertumbuhan Ekonomi Kota Jayapura dalam bentuk persentase selama periode 2017 hingga 2021. Pertumbuhan ekonomi, yang mencerminkan perubahan nilai ekonomi suatu daerah dalam jangka waktu tertentu, adalah indikator penting dalam mengukur kesehatan dan dinamika ekonomi sebuah wilayah. Pada tahun 2017, Pertumbuhan Ekonomi Kota Jayapura mencapai 4,95%, menunjukkan ekspansi ekonomi yang positif dengan peningkatan nilai output. Namun, pertumbuhan ini mengalami perlambatan pada tahun 2018, dengan angka 2,61%, menandakan adanya penurunan laju pertumbuhan. Tahun 2019 menunjukkan perubahan dramatis, di mana ekonomi mengalami kontraksi sebesar -3,24%, menandakan penurunan signifikan dalam nilai ekonomi. Pada tahun 2020, terjadi sedikit pemulihan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1,24%, menunjukkan upaya perlahan dalam mengembalikan kinerja ekonomi. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan lebih lanjut dengan Pertumbuhan Ekonomi mencapai 3,17%, mengindikasikan pemulihan yang lebih kuat dalam aktivitas ekonomi. Fluktuasi ini merefleksikan kompleksitas faktor-faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi dinamika ekonomi kota, termasuk kebijakan pemerintah, kondisi pasar, dan perubahan dalam belanja modal atau pendapatan daerah. Laju pertumbuhan yang fluktuatif ini diduga disebabkan oleh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah yang juga mengalami fluktuasi (Megasari, 2020).

Tabel 2. Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura Tahun 2017-2021 (Ribuan Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah
2017	96,961,324,536
2018	195,735,106,684
2019	201,137,583,619
2020	103,441,919,381
2021	221,765,651,610

Sumber: bpkbd.luwuutaraKotago.id (APBD)

Berdasarkan tabel 2, Data yang tercantum menggambarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura dalam Rupiah selama periode 2017 hingga 2021. PAD merupakan sumbangan pendapatan utama bagi pemerintah daerah yang bersumber dari berbagai sumber seperti pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya. Pada tahun 2017, PAD Kota Jayapura tercatat sebesar 96,961,324,536 Rupiah, menggambarkan jumlah pendapatan awal dalam periode yang dianalisis. Terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2018, di mana PAD meningkat menjadi 195,735,106,684 Rupiah. Lonjakan ini mengindikasikan kesuksesan dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dari berbagai sumber. Pada tahun 2019, pendapatan terus meningkat menjadi 201,137,583,619 Rupiah, menggambarkan kelanjutan dalam upaya mengumpulkan pendapatan daerah. Pada tahun 2020, terjadi penurunan yang cukup besar menjadi 103,441,919,381 Rupiah, mungkin dipengaruhi oleh perubahan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2021, terjadi lonjakan yang mencolok menjadi 221,765,651,610 Rupiah, yang mungkin menunjukkan pemulihan ekonomi dan perbaikan manajemen pendapatan. Fluktuasi dalam data menggambarkan kompleksitas faktor eksternal dan internal yang memengaruhi pendapatan daerah, seperti perubahan kebijakan pajak dan perkembangan ekonomi. Pendapatan Asli Daerah memiliki peran vital dalam mendukung pengeluaran pemerintah daerah dalam berbagai bidang pembangunan dan pelayanan publik.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Kota Jayapura Tahun 2017- 2021

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2017	288,786
2018	293,690
2019	297,750
2020	300,192
2021	312,004

Sumber: luwuutaraKotabps.go.id

Pada tabel 3, menggambarkan Jumlah Penduduk Kota Jayapura dalam jutaan jiwa selama rentang waktu 2017 hingga 2021. Jumlah penduduk merupakan indikator vital dalam menganalisis perkembangan suatu daerah dan memiliki dampak signifikan pada berbagai aspek sosial dan ekonomi. Pada tahun 2017, Jumlah Penduduk Kota Jayapura tercatat sebanyak 288,786 jiwa. Dalam kurun waktu satu tahun, angka ini mengalami peningkatan menjadi 293,690 jiwa pada tahun 2018, mencerminkan adanya pertumbuhan populasi yang terjadi. Tren ini terus berlanjut, dengan peningkatan menjadi 297,750 jiwa pada tahun 2019 dan 300,192 jiwa pada tahun 2020. Namun, perubahan yang paling mencolok terjadi pada tahun 2021, di mana jumlah penduduk melonjak tajam menjadi 312,004 jiwa. Faktor-faktor seperti laju kelahiran, angka kematian, dan migrasi mungkin berkontribusi pada fluktuasi

dalam pertumbuhan penduduk yang teramati. Data ini memberikan gambaran tentang perubahan populasi dan memungkinkan pemahaman lebih lanjut mengenai dinamika sosial dan ekonomi di Kota Jayapura.

Tabel 4. Belanja Modal Kota Jayapura Tahun 2017 – 2021 (Ribuan Rupiah)

Tahun	Belanja Modal
2017	1,918,505,428
2018	2,811,607,953
2019	3,973,394,255
2020	3,541,099,943
2021	4,171,551,173

Sumber : bpkbd.luwuutaraKotago.id (APBD)

Pada tabel 4, memberikan gambaran tentang Belanja Modal Kota Jayapura selama rentang waktu 2017 hingga 2021. Belanja Modal menggambarkan alokasi dana pemerintah untuk proyek pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pada tahun 2017, Belanja Modal mencapai 1,918,505,428 Ribuan Rupiah, menunjukkan komitmen pemerintah dalam investasi pembangunan. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2018, mencapai 2,811,607,953 Ribuan Rupiah, mengindikasikan intensifikasi upaya pembangunan. Tren ini terus berlanjut pada tahun 2019, dengan peningkatan lebih lanjut menjadi 3,973,394,255 Ribuan Rupiah, menunjukkan dorongan untuk mengembangkan infrastruktur dan layanan publik. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan menjadi 3,541,099,943 Ribuan Rupiah, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor ekonomi atau perubahan prioritas anggaran. Pada tahun 2021, Belanja Modal kembali meningkat menjadi 4,171,551,173 Ribuan Rupiah, mencerminkan usaha pemerintah dalam memajukan investasi pembangunan. Fluktuasi ini menggambarkan adanya perubahan dalam alokasi dana yang dapat dipicu oleh dinamika ekonomi, kebijakan pemerintah, dan kebutuhan pembangunan kota.

Berdasarkan pemaparan peneliti di atas, motivasi yang mendasari penelitian ini adalah alokasi anggaran investasi yang meningkat setiap tahunnya. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, salah satunya dengan menggunakan belanja modal untuk memenuhi target investasi. Peningkatan penanaman modal oleh karena itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi (kontribusi) masyarakat terhadap pembangunan. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik meneliti tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah (PAD), dan jumlah penduduk terhadap belanja modal di Kota Jayapura.

Belanja Modal

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 / PMK.06 / 2007 tentang Standar Bagan Akun, disebutkan belanja modal sebagai belanja anggaran untuk perolehan atau penambahan aset tetap dan aset lain yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batas kapitalisasi minimum untuk aset tetap atau aset lain ditentukan oleh pemerintah dimana aset tersebut digunakan dalam operasi sehari-hari dari unit kerja yang tidak dapat dijual.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan pendapatan nasional yang signifikan dalam kurun waktu tertentu (peningkatan pendapatan per kapita). Menurut Mankiw yang dikutip oleh Menik (2016), PDB sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian. Tujuan PDB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu. Ada dua cara untuk memeriksa ukuran PDB: Yang pertama adalah dengan menganggap PDB sebagai total pendapatan semua orang dalam perekonomian. Cara lain untuk mengamati PDB adalah dengan menggunakan total pengeluaran untuk output produk dan jasa ekonomi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang No 28, 2009 tentang Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PAD adalah sumber keuangan daerah yang digali dari Daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil 1 pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Sementara itu PAD adalah semua pendapatan keuangan suatu daerah, dimana pendapatan tersebut berasal dari potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, dan pendapatan keuangan diatur dengan peraturan daerah. Sedangkan menurut Hasyim (2017), PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Adapun sumber-sumber PAD sebagaimana yang diatatur dalam (Undang-Undang 32, 2004) Pasal 157.

Jumlah Penduduk

Penduduk Indonesia menurut Badan Pusat Statistik adalah semua orang yang telah tinggal di wilayah teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi mempunyai tujuan menetap. Penduduk juga berperan penting dalam meningkatkan belanja daerah. Artinya, jumlah penduduk di suatu provinsi sangat berpengaruh dalam meningkatkan belanja daerah. Besar kecilnya jumlah penduduk akan dihadapkan pada seberapa cepat kemampuan menambah jumlah sarana pemuas kebutuhan serta sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk untuk mendapatkan penjelasan dari sebuah teori dan hukum-hukum realitas. Penelitian kuantitatif seringkali di pakai untuk melihat bukti dan menampik suatu teori, kemudian di bahas dan diambil kesimpulan. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder yaitu berupa laporan realisasi APBD Kota Jayapura yang diakses melalui situs resmi pemerintah www.djpk.depkeu.go.id dan data jumlah penduduk yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Jayapura. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data sekunder untuk memperoleh data yang mendukung penelitian seperti laporan realisasi anggaran, catatan atas laporan keuangan dan dokumen – dokumen tertulis di kantor BPKAD Kota Jayapura dan di kantor BPS Kota Jayapura. Untuk menjawab hipotesis penelitian, data akan dianalisis menggunakan beberapa tahapan pengujian seperti uji regresi linear berganda, uji asumsi klasik melalui uji normalitas, uji multikolinearitas, uji

heteroskedastisitas, uji autokorelasi, untuk menjawab hipotesis dalam penelitian ini, data akan dianalisis menggunakan uji parsial (uji t).

Proses analisis data menggunakan metode regresi linear berganda dengan rumus:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

- Y : Belanja Modal Pemerintah
- a : Konstanta
- X1 : Pertumbuhan Ekonomi
- X2 : Pendapatan Asli Daerah
- X3 : Jumlah Penduduk
- b_{1,2,3} : Koefisien Regresi
- e : Variabel yang tidak diteliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil statistik deskriptif diperoleh sebanyak 10 tahun dari tahun 2012 - 2021. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi (X1), pendapatan asli daerah (X2), jumlah penduduk (X3) dan belanja modal (Y). Variabel-variabel tersebut akan di uji dengan statistik deskriptif. Hasil pengujian disajikan dalam tabel 5.

Tabel 5. Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	10	-.01	.09	.0630	.02869
X2	10	95395043952	143824528230	111637841359	14855841266.74380
X3	10	292765.00	325050.00	307738.4000	10244.22158
Y	10	199897939340	585692315018	299847635963.2	123745828998.3387

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 5, X1 memiliki nilai minimum -0,01 nilai maksimum 0,09 dan mean 0,0630 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan tingkat ekonomi Jayapura pada tahun 2012- 2021 sebesar 0,0630. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,02869 dari nilai rata-rata.

Pendapatan Asli Daerah (X2) memiliki nilai minimum 95.395.043.952 nilai maksimum 143.824.528.230 dan mean 111.637.841.359 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan PAD Jayapura pada tahun 2012- 2021 sebesar 111.637.841.359. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 14855841266,74380 dari nilai rata-rata.

Jumlah Penduduk (X3) memiliki nilai minimum 292.765 nilai maksimum 325.050 dan mean 307.738 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan jumlah penduduk Jayapura pada tahun 2012- 2021 sebesar 307.738 Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 10244.22158 dari nilai rata-rata.

Belanja Modal (Y) memiliki nilai minimum 199,897,939,340 nilai maksimum 585,692,315,018 dan mean 299,847,635,963 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan jumlah penduduk Jayapura pada tahun 2012- 2021 sebesar

299,847,635,963 Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 123,745,828,998 dari nilai rata-rata.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residu memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011). Untuk menguji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Kolmogorov Smirnov (KS) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Untuk lebih jelasnya akan disajikan hasil uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov yang dapat dilihat melalui tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4121.52131381
Most Extreme Differences	Absolute	.113
	Positive	.106
	Negative	-.113
Test Statistic		.113
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Source: Data diolah, 2023

Tabel 6 menunjukkan bahwa taraf signifikansi adalah sebesar 0.200 yang berada di atas 0,05, dengan demikian nilai residual terdistribusi secara normal sehingga model penelitian dinyatakan telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi, maka dinamakan adanya problem autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin Watson. Hasil uji autokorelasi disajikan pada tabel 7.

Tabel 7. Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.995 ^a	.990	.984	15519853528.94168	2.730

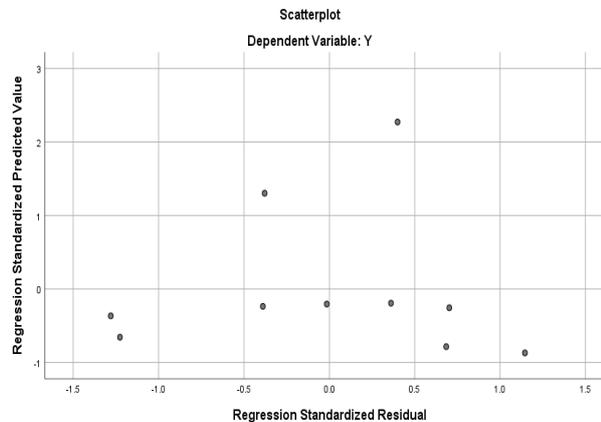
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah, 2023

Dari tabel 7 ternyata koefisien Durbin-Watson besarnya 2,730. Yang dimana nilai DW berada diantara $-3 < DW < +3$ ($-3 < 2,730 < +3$) dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam regresi antara variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, jumlah penduduk terhadap belanja modal tidak terjadi autokorelasi.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang heterokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2011). Cara mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen.



Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas
 Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan gambar 1 grafik scatterplot menunjukkan bahwa data tersebar pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola yang jelas dalam penyebaran data tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi tersebut, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi belanja modal dengan variabel yang mempengaruhi yaitu pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan jumlah penduduk.

Selanjutnya uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2013). Dalam uji multikolinieritas dapat dideteksi dengan melihat nilai tolerance (TOL) dan variabel inflation factor (VIF). Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolonieritas. Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Uji Multikolonieritas
 Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pertumbuhan Ekonomi (X1)	.431	2.322
Pendapatan Asli Daerah (X2)	.374	2.676
Jumlah Penduduk (X3)	.220	4.541

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 8, terlihat bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan jumlah penduduk. memiliki nilai tolerance diatas 0,1 dan VIF lebih kecil dari 10. Hal ini berarti dalam model persamaan regresi tidak terdapat gejala multikolonieritas sehingga data dapat digunakan dalam penelitian ini.

Setelah hasil uji asumsi klasik dilakukan dan hasilnya secara keseluruhan menunjukkan model regresi memenuhi asumsi klasik, maka tahap berikut adalah melakukan evaluasi dan interpretasi model regresi berganda. Uji regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui hubungan fungsional antara variabel bebas (independent) terhadap variabel terikat (dependent). Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	1733073000264.098	297760644026.473		5.820	.001
Pertumbuhan Ekonomi (X1)	2370024826769.260	274729732618.450	.550	8.627	.000
Pendapatan Asli Daerah (X2)	1.444	.570	.173	2.534	.044
Jumlah Penduduk (X3)	7614886.615	1076096.586	.630	7.076	.000

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 9, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah:

$$Y = 1733073000264.098 + 2370024826769.260 X1 + 1.444 X2 + 7614886.615 X3$$

Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Nilai konstanta adalah 1733073000264.098 ini menunjukkan bahwa, jika variabel independen (pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan jumlah penduduk) bernilai nol (0), maka nilai variabel dependen (belanja modal) sebesar 1733073000264.098 satuan.

Koefisien regresi Pertumbuhan Ekonomi (b1) adalah 2370024826769.260 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 2370024826769.260 jika nilai variabel X1 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka tingkat belanja modal akan mengalami kenaikan.

Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (b2) adalah 1.444 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 1.444 jika nilai variabel X2 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel pendapatan asli daerah dengan variabel belanja modal. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi belanja modal.

Koefisien regresi Jumlah Penduduk (b3) adalah 7614886.615 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 7614886.615 jika nilai variabel X3 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan

yang searah antara variabel jumlah penduduk (X3) dengan variabel belanja modal (Y). Semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin tinggi belanja modal.

Pengujian Hipotesis Pertama

Tabel 9 menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien b1 yang bernilai +2370024826769.260 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti H1 diterima dan sehingga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Pengujian Hipotesis Kedua

Tabel 9 menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki tingkat signifikan sebesar 0,044 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien b2 yang bernilai 1.444 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti H2 diterima sehingga dapat dikatakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Pengujian Hipotesis Ketiga

Tabel 9 menunjukkan bahwa variabel Jumlah Penduduk memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien b3 yang bernilai +7614886.615 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti H3 diterima sehingga dapat dikatakan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Selanjutnya uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Hasil pengujian disajikan pada tabel 10.

Tabel 10. Uji R² Determinasi Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.995 ^a	.990	.984	15519853528.94168	2.730

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah, 2023

Dari tabel 10 terdapat angka R sebesar 0,995 yang menunjukkan bahwa hubungan antara belanja modal dengan ketiga variabel independennya sangat kuat, karena berada di defenisi kuat yang angkanya berada di 0,5 – 0,8. Sedangkan nilai R square sebesar 0.990 atau 99,0% ini menunjukkan bahwa variabel belanja modal, dapat dijelaskan oleh variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan jumlah penduduk. Sebesar 99,0% sedangkan sisanya 1% dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dapat disebabkan karena semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin meningkat belanja

modal. Hal tersebut dikarenakan biasanya bila Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah Kota Jayapura akan terus meningkatkan alokasi Belanja Modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada tahun anggaran dan Pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan apabila belanja modal dialokasikan secara tepat. Sehingga segala sesuatu hal yang dibutuhkan pada provinsi yang bersangkutan dapat terpenuhi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Restianto, 2011; Sita, 2016) bahwa belanja modal memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Utami & Indrajaya, 2019) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini senada dengan penelitian oleh (Putra, 2016; Waryanto, 2017) bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berarti bahwa jika belanja modal naik, maka bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dapat disebabkan karena semakin meningkat pendapatan asli daerah maka semakin meningkat belanja modal. Hal ini artinya jika pendapatan asli daerah naik maka peningkatan pendapatan daerah pada setiap tahunnya akan semakin meningkatkan alokasi belanja modal pemerintah daerah. Sehingga dana alokasi dana perimbangan yang biasa dialokasikan untuk menutupi ketimpangan anggaran pemerintah daerah akan semakin berkurang dan itu tentunya merupakan perkembangan positif yang menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang semakin baik kedepannya dan dapat diartikan bahwa semakin tinggi PAD maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Permata & Riharjo, 2016) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja anggaran modal dan (Lubis, 2019) yang menemukan bahwa PAD, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Jumlah Penduduk suatu daerah, maka semakin tinggi pula Belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah tersebut. Mengingat bahwa besarnya jumlah penduduk akan berhadapan dengan seberapa cepat kemampuan bertambahnya jumlah alat-alat pemuas kebutuhan serta sarana dan prasarana (infrastruktur) untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi, dapat diartikan bahwa pemerintah daerah Kota Jayapura perlu mempertimbangkan Jumlah Penduduk di daerahnya dalam mengambil keputusan untuk penggunaan belanja modalnya. Maka dari itu, pihak legislatif dan eksekutif membuat kebijakan yang dapat mencakup semua kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, informasi mengenai jumlah penduduk sangat diperlukan dalam pembuatan kebijakan pemerintahan.

Maka hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Widiagma (2015) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh

positif terhadap belanja modal. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aziz (2014) yang menyatakan bahwa kecepatan penduduk secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal karena ketidakmerataan kepadatan penduduk dengan kapasitas fiskal daerahnya, sehingga pemerintah provinsi harus memprioritaskan program mereka berdasarkan karakteristik wilayah mereka.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dapat disebabkan karena semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin meningkat belanja modal. Hal tersebut dikarenakan biasanya bila Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus meningkatkan alokasi Belanja Modalnya dari tahun ke tahun. (2) Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dapat disebabkan karena semakin meningkat pendapatan asli daerah maka semakin meningkat belanja modal. Hal ini artinya jika pendapatan asli daerah naik maka peningkatan pendapatan daerah pada setiap tahunnya akan semakin meningkatkan alokasi belanja modal pemerintah daerah. (3) Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Jumlah Penduduk suatu daerah, maka semakin tinggi pula Belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah tersebut. Mengingat bahwa besarnya jumlah penduduk akan berhadapan dengan seberapa cepat kemampuan bertambahnya jumlah alat-alat pemenuh kebutuhan serta sarana dan prasarana (infrastruktur) untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1. Bagi pemerintah daerah Kota Jayapura, diharapkan agar lebih memperhatikan keuangan daerahnya sebagai langkah dalam pengoptimalan peningkatan pelayanan daerah. Dan pemerintah daerah agar lebih menggali potensi yang ada di daerah tersebut untuk menambah pendapatan asli daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lebih memanfaatkan secara maksimal pendapatan transfer dari pemerintah pusat sehingga dapat meningkatkan alokasi belanja modal dalam APBD daerah Kota Jayapura. 2. Bagi masyarakat Kota Jayapura, diharapkan ikut berpartisipasi dan turut serta dalam pengembangan potensi untuk meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi daerah. 3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk lebih memperluas dan memperbanyak sampel penelitian seperti pemerintah kabupaten/kota di Papua serta memperbaharui periode pengamatan dan penggunaan data yang lebih lengkap dan bervariasi sehingga dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut.

Referensi:

- Arifin, Z., & Jambi, I. (2009). Memahami PDRB sebagai instrumen untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di daerah. Retrieved from Bappeda Prov. Jambi Website: https://bappeda.jambiprov.go.id/welcome/download_file_artikel/Artikel_PD_RB.pdf
- Arsyad, L. (2004). Ekonomi pembangunan dan perencanaan pembangunan. Edisi

Keempat. STIE YKPN. Yogyakarta.

- Asmuruf, M. (2015). Pengaruh pendapatan dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kota Sorong. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/10446>
- Aziz, A., & Wulandari, R. (2014). Analisis pengaruh equalization grant, sumber kemandirian fiskal, sumber pembiayaan defisit dan faktor penyerap fasilitas publik terhadap belanja modal daerah. *Accounting Analysis Journal*, 1, 1-20. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/92483>
- Ghozali, I. (2011). *Application of multivariate analysis with SPSS program*. In Diponegoro University Publishing Agency (second edi). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2013). *Structural equation modeling metode alternatif dengan partial least square*. Badan Penerbit Univeritas Diponegoro, 244.
- Halim, A. (2004). *Manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hasyim, A. I. (2017). *Ekonomi makro*. Prenada Media.
- Indonesia, P. R. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*.
- Indonesia, R. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta (ID): RI.
- Lubis, H. U. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil terhadap belanja modal (studi kasus badan pengelola keuangan dan aset daerah kota Medan). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/6582>
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & manajemen keuangan daerah: edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Marseno, B., & Mulyani, E. (2020). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah (PAD), jumlah penduduk dan luas wilayah terhadap belanja modal pemerintah daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3452-3467. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/article/view/295>
- Megasari, M. (2020). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jayapura. *Dinamis: Journal of Islamic Management and Bussiness*, 3(1). <https://doi.org/10.24256/dinamis.v3i1.1822>
- Permata, Z. S. W., & Riharjo, I. B. (2016). Pengaruh pendapatan asli daerah (Pad) dan dana perimbangan (Dp) terhadap belanja modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(9). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2256>
- Putra, D. D. (2016). Pengaruh dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/65058>
- Restianto, S. (2011). Pengaruh Kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah. Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto. https://journal.bakrie.ac.id/index.php/journal_MRA/article/view/22
- Safari, M. F., & Fikri, A. (2016). Analisis pengaruh ekspor, pembentukan modal, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

- [https://eprints.uny.ac.id/41252/1/18 Menik.pdf](https://eprints.uny.ac.id/41252/1/18%20Menik.pdf)
- Sita, P. R. A. (2016). Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di pulau Kalimantan. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 2(2), 180-198. <http://ejournal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/284>
- Sudaryo, Y., Sjarif, D., Sofiati, N. A., & Bandung, S. I. (2021). *Keuangan di era otonomi daerah*. Penerbit Andi.
- Sukirno, S. (2013). *Makroekonomi teori pengantar (ketiga)*. In Rajagrafindo Persada.
- Undang-Undang No 22. (1999). *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 23. (2022). *Tentang*. In Peraturan daerah kabupaten luwu timur nomor 13 tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Luwu Timur tahun anggaran 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Vol. 2, Issue 5, p. 255). (2009).
- Utami, D. N., & Indrajaya, I. G. B. (2019). Pengaruh PAD dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ep Unud*, 8(10), 2195-2225. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/download/46827/31954>
- Waryanto, P. (2017). Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 35-55. <https://doi.org/10.33105/itrev.v2i1.13>
- Widiagma, A. P. (2015). Pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) dan jumlah penduduk terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/65003>